SAHNYA MEWARISI HARTA PUSAKA (*Legitimately Inherited The Treasures*)

Rukiah

rukiah@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract : The treasures which are commonly called as inheritance are abandoned property by someone die that can be inherited by the heir. Legitimately inherited the treasures are with the fulfillment of the inheritance requirements and pillars. The requirements and pillars which is intended the existence of important elements namely heir, inheritance (treasures), and there is no the obstruction in inheriting. As for the pillars inherit the treasures are muwarrits is corpse itself, either real or declared legally, such as the missing people and declared dead, Al-waarits is the people that have the caused inheritance with the died so he gained the legacy. This is Al-waarits commonly called with the heir. And Al-Mauruuts is the treasure or claim which is moved from which bequeath. Al-Mauruuts is also inherited treasure. The inherited treasures are the net asset from the costs of corpse maintenance, payment of debt and execution of his will.

Keywords : The treasures, Muwarrits, Al-waarits

Harta pusaka yang biasa disebut dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Sahnya mewarisi harta pusaka adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun pewarisan. Syarat dan rukun yang dimaksud yakni adanya unsur-unsur yang penting yaitu ahli waris, harta warisan (harta pusaka), pewaris dan tidak adanya halangan-halangan dalam pewarisan. Adapun rukun-rukun mewarisi harta pusaka adalah Al-muwarrits yaitu mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati, Al-waarits ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan. Al-waarits ini biasa juga disebut dengan ahli waris. Dan Al-Mauruuts ialah harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan. Al-mauruuts ini juga merupakan harta yang diwariskan. Harta yang akan diwariskan ini adalah harta yang bersi dari biaya perawatan jenazah, pembayaran utang dan pelaksanaan wasiatnya.

PENDAHULUAN

Terjadinya pusaka mempusakai harta pusaka, maka harta itu wajib dibagi menurut pembagian yang telah diatur oleh Islam, dan harta yang dimaksud dinamakan tirkah.¹

Islam telah mengatur sistem pembagian harta pusaka, tetapi masih terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat khususnya masyarakat Islam tentang cara mewarisi harta pusaka. Allah telah memberikan petunjuk yang merupakan peringatan dalam menetapkan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam mewarisi harta pusaka. Oleh karenanya, manusia perlu berhati-hati dalam mewarisi harta pusaka.

Selama manusia masih dapat menerima pendapat bahwa hukum adalah pencerminan dari alam fikiran masyarakat, dan keadaan masyarakat itu sendiri berbeda-beda alam fikiran dan kemasyarakatan, maka untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dalam harta pusaka diantara pria dan wanita agaknya masih sukar, sebab pandangan yang demikian masih berpegang pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat/lingkungannya. Manusia bukanlah ibarat benda yang dapat diperbuat sesuka hati dan juga manusia tidak terlepas dari pengaruh alam sekitarnya. Namun manusia bukan juga merupakan benda mati yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Selain itu manusia juga mempunyai keyakinan atau kepercayaan, dan sebagai manusia Indonesia adalah diliputi oleh ajaran

¹M.Mizan Asrori Zain Mohammad, *Al-Faraid "Pembagian Pusaka dalam Islam"*, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1981, h. 3.

Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.² Ajaran ini merupakan salah satu azas pembangunan nasional, yaitu azas keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³ Pernyataan ini memerlukan jawaban dari kenyataan, sejauh mana manusia itu menjadi abdi dari Tuhannya. Persoalan pembagian harta pusaka bagi seorang Islam berdampak pada penggolongan orang-orang yang taqwa, yaitu mematuhi ketentuan dari Tuhannya. Pembagian harta pusaka bagi seorang Islam merupakan implikasi dari melaksanakan pembagian dengan berpatokan pada laki-laki berbanding perempuan yaitu dua berbanding satu. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Terjemah :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".⁴

Sebelum melaksanakan pembagian harta pusaka, maka terlebih dahulu diketahui hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga harta pusaka itu dapat diwarisi sebagaimana layaknya. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang calon pewaris adalah adanya syarat dan rukun dalam mewarisi harta pusaka.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengetengahkan masalah pokok yakni bagaimana sahnya mewarisi harta pusaka. Kemudian penulis mengangkat dua sub masalah yaitu: (1) Bagaimana syarat-syarat sahnya mewarisi harta pusaka ?, dan (2) Bagaimana rukun-rukun sahnya mewarisi harta pusaka ?

PEMBAHASAN

A. Syarat dan Rukun Mewarisi Harta Pusaka

Sebelum penulis menguraikan syarat-syarat mewarisi harta pusaka terlebih dahulu diketengahkan pengertian harta pusaka. Harta

pusaka disebut juga harta warisan adalah harta peninggalan dari seorang meninggal dunia yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Al-Qur'an mengemukakan harta warisan disebut dengan istilah Tarakah yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan. Namun tidaklah semua harta peninggalan dapat diwarisi. Harta yang dapat diwarisi adalah harta yang sudah bersih, bebas dari sangkut paut orang lain termasuk tajhiz, utang dan wasiat.⁵

Hal pusaka mempusakai menyangkut harta benda sebagaimana diketahui, harta benda itu mempunyai pemilik jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Adanya jalan pusaka mempusakai itu akan terjadi peralihan perpindahan hak pemilikan atau hak milik. Terdapat beberapa terjadinya pusaka mempusakai ia sebagai berikut:

1. Muwarris (Pewaris)

Muwarris, artinya orang yang mewariskan.⁶ Kompilasi hukum Islam Pasal 171 menjelaskan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan dia beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁷

Pusaka mempusakai baru terjadi apabila si pewaris telah meninggal dunia. Artinya selagi pewaris masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses kewarisan.⁸ Apabila pewaris masih hidup dan pada saat itu terjadi peralihan harta kepada ahli waris, maka pemberian itu tidak termasuk dalam kategori waris mewarisi atau pusaka mempusakai. Hal itu merupakan pemberian atau hibah saja, sehingga dalam waris mewarisi atau pusaka mempusakai kelak harta benda yang sudah diberikan itu tidak termasuk yang diperhitungkan. Artinya harta benda tersebut tidak termasuk *tirkah*.

Pada kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata, maupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim

⁵A. Assaad Yunus, *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraid)*, Jakarta: PT. Al-Qushwa 1992), h. 27-28.

⁶Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, (Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), h.17.

⁷Abdul Gani Abdullah, *Pengantar hukum Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1994 M/1415 H), h. 12.

⁸*Ibid*.

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983, h. 12.

³Republik Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan negara 1993*, Bab II, Nomor 3 sub a.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Baru, Semarang. CV. Toha Putra 1989), h. 116.

memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menyebabkan orang yang hilang sebagai yang mati secara hakiki.⁹

Sebagai akibat kematian pewaris ialah bahwa harta pusaknya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya. Kematian pewaris ada tiga macam, yaitu mati *hakiki* (sejati), mati *hukmi* (yuridis), dan mati *taqdiri* (menurut dugaan).

Mati *hakiki* adalah kematian yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera. Mati *hukmi* ialah kematian atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya.¹⁰ Mati *taqdiri* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan yang keras.¹¹ Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, sehingga bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. Kemudian yang demikian disebut mati *taqdiri* (mati menurut dugaan).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka kesimpulannya bahwa syarat yang pertama sahnya mewarisi harta pusaka adalah matinya *muwarris* (orang yang mewariskan) atau disebut pewaris.

2. Warits (Ahli Waris)

Ahli waris ini benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, apabila ahli waris ini dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka ia berhak memperoleh harta pusaka.

Ahli waris yang dimaksud adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, dia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

Namun yang menjadi rumit apabila *mafqud* yaitu orang hilang atau tidak diketahui kabar beritanya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Keputusan dalam hal ini diperlukan keputusan dari hakim. Hakimlah yang berhak memutuskan ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Apabila hakim memutuskan ia mati sebelum pewaris meninggal dunia, maka dalam hal ini tidak ada persoalan, karena ia memang tidak mendapat harta pusaka. Tetapi apabila ia mendapat putusan dari hakim bahwa ia masih hidup dan hidupnya itu sebelum pewaris meninggal dunia, maka ia akan mendapat harta warisan. Selain itu hidupnya juga itu ditunggu dan ditentukan sampai kapan ia ditunggu, sementara itu harta pusaknya disisihkan.¹³ Syarat kedua sahnya mewarisi harta pusaka adalah adanya ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang.

3. Bebas dari Halangan.

Bebas dari halangan yang dimaksud adalah tidak adanya penghalang-penghalang yang menghalangi pewarisan.¹⁴ Ahli waris yang akan menerima harta pusaka harus diteliti dahulu, apakah ada yang menggugurkan haknya atau tidak seperti pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud adalah ahli waris membunuh pewaris, sehingga syarat ketiga dalam mewarisi harta pusaka adalah tidak adanya halangan-halangan kewarisan.

B. Rukun-rukun Mewarisi Harta Pusaka

Pada dasarnya syarat dan rukun dalam pewarisan itu sama, karena sama-sama mengandung dua unsur yang penting yaitu adanya pewaris dan ahli waris. Ada beberapa rukun-rukun mewarisi harta pusaka adalah:

1. *Al-muwarrits*

Al-muwarrits adalah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.¹⁵ *Al-muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi, mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan.¹⁶ Jadi terjadinya pewarisan karena ada *al-muwarrits* sebagai rukun pertama.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikhi Sunnah*, Jilid 14 (Cet.1. Bandung: Al-Ma'rif, 1987), h. 241.

¹⁰Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Cet.1; Semarang: Mujahidin, 1981), h.12.

¹¹Lihat, *Ibid*.

¹²Abdul Gani Abdullah, *loc.cit*.

¹³Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*, *op.cit.*, h. 18.

¹⁴Sayyid Sabiq, *loc.cit*.

¹⁵Lihat, *Ibid*.h. 240.

¹⁶Muslich Maruzi, *op.cit*. h.11.

2. *Al-waarits*

Al-waarits ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan. *Al-waarits* biasa juga disebut dengan ahli waris. *Al-waarits* adalah orang yang akan mewarisi harta pusaka si mati karena adanya hubungan nasab atau perkawinan, dan atau hak perwalian (*al-waala'*) dengan si mati.¹⁷ Orang yang mendapat harta pusaka dari kalangan ahli waris ialah mereka yang tidak termasuk *mahjub hirman*. *Mahjub hirman* ialah hilangnya hak seseorang untuk menerima pusaka disebabkan karena adanya ahli waris yang dekat sehingga menghalanginya seperti hilangnya hak cucu perempuan mendapat harta pusaka disebabkan karena adanya anak laki-laki, sedangkan mereka yang masuk golongan *mahjub nuqsanialah* adalah mereka mendapatkan bagian tetapi berkurang, atau dengan kata lain berkurangnya hak seseorang untuk mendapatkan bagiannya disebabkan karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Misalnya berkurangnya hak suami mendapat seperdua menjadi seperempat disebabkan karena si isteri meninggalkan anak atau cucu.

3. *Al-Mauruuts*

Al-mauruuts ialah harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan. *Al-mauruuts* ini juga merupakan harta yang diwariskan. Harta yang akan diwariskan ini adalah harta yang bersih dari biaya perawatan jenazah, pembayaran utang dan pelaksanaan wasiatnya.

Rukun-rukun mewarisi harta pusaka adalah adanya unsur pewaris, ahli waris, dan harta pusaka. Terpenuhinya syarat dan rukun mewarisi harta pusaka ini, maka tidak ada lagi penghalang dalam memiliki harta pusaka menurut bagian masing-masing.

PENUTUP

Sahnya mewarisi harta pusaka adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun pewarisan. Syarat dan rukun yang dimaksud yakni adanya unsur-unsur yang penting yaitu ahli waris, harta warisan (harta pusaka), pewaris dan tidak adanya halangan-halangan dalam pewarisan.

Pada prinsipnya syarat-syarat dan rukun-rukun mewarisi harta pusaka itu adalah sama, meskipun syarat dan rukun berbeda karena

keduanya mengandung unsur pewaris dan ahli waris. Hal yang membedakan adalah kalau syaratnya unsur ketiga yakni tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi, sedangkan kalau rukun-rukun unsur ketiga adalah adanya harta pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1994 M/1415.

Anwar, H. Moch, *Fikh Islam*, (Cet. III; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

_____ *Faraid Hukum Waris dan Islam dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru; Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

_____ *Ilmu Fikh*, Jilid III, (Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, Depag, 1986.

Hasan, A. Al-Faraid. *Ilmu Pembagian Waris*, (Cet. XI; Surabaya: Pustaka Progressif, 1986.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983.

Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. (Cet. I; Semarang: Mujahidin, 1981.

Muhammad, M. Mizan Asrori Zani, *al-Faraid, Pembagian Pusaka dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981.

Rahman, Patchur. *Ilmu Waris*. (Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.

Republik Indonesia. *Garis-garis Besar Haluan Negara*. (Jakarta: Bp-7 Pusat, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fikh Sunnah*, jilid 14, (Cet. II; Bandung: Al-Ma'arif, 1987)

Ash-Shiddieqy, TM. Hasby, Prof. Dr., *Fiqhul Waris*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Yunus, a. Assaad. *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraid)*. (Jakarta: Al-Qushwa, 1992.

¹⁷Lihat, *Ibid*.